TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN SINJAI

Mudhi'ah Muhdsan[1)], Nirwana[2)], Darmawati[3)]
[1,2,3]Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: M.Muhdsan, mudhiahmuhdsan22@gmail.com, Makassar, Indonesia

Abstract

The research aims to analyze the performance of the revenue, expenditure, and financing budgets in Sinjai government during the 2021-2023 period. Quantitative analysis methods were used to analyze secondary data from the APBD Budget Realization Report. The study results show that regional revenue performance is included in the good category, with an average budget realization of 294.47% and positive growth of 38.93%. The decentralization ratio and regional financial dependence are included in the low category, indicating dependence on fund transfers from the Indonesian government. Regional spending performance is included in the good category, reflected in the budget realization, which reached 96.60%, but capital expenditures need to be increased. Regional financing shows stability and efficiency with positive SiLPA.

Keywords: performance, sinjai government, revenue, budgets, apbd report

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di Kabupaten Sinjai selama periode 2021-2023 menggunakan metode analisis kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah termasuk kategori baik dengan realisasi anggaran rata-rata 294,47% dan pertumbuhan positif 38,93%. Untuk Rasio desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah termasuk kategori rendah, hal ini mengindikasikan ketergantungan pada transfer dana dari pusat. Kinerja belanja daerah termasuk kategori baik, hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai 96,60%, namun belanja modal perlu ditingkatkan. Pembiayaan daerah menunjukkan stabilitas dan efisiensi dengan SiLPA positif.

Kata Kunci : kinerja, pendapatan, belanja, kabupaten sinjai, laporan apbd

A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengelola sumber daya sesuai dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian, hal ini juga membawa risiko fiskal (Rufit & Desmiwerita, 2020). Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dalam perencanaan hingga evaluasi,

dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemberi wewenang. Pemerintah daerah diharuskan mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) demi kesejahteraan masyarakat (Hanifa & Amalia, 2022).

APBD sebagai rencana keuangan tahunan harus disusun berdasarkan kinerja dengan orientasi pada pencapaian target yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Dalam struktur anggaran berbasis kinerja, alokasi belanja daerah harus mencerminkan transparansi dan ketepatan sasaran, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. APBD merupakan indikator keberhasilan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lokal berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan dimasyarakat, selain mendukung sektor swasta, APBD juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan peningkatan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari belanja rutin dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah (Marwati & Pratiwi, 2023).

Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sinjai untuk mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LRA ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Data dari LRA Kabupaten Sinjai akan menjadi dasar dalam menganalisis kinerja keuangan daerah dan keberhasilan dalam pengelolaan APBD (Halim & Iqbal, 2019).

Pendapatan daerah ialah seluruh penerimaan yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah selama periode anggaran, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional (Arman et al., 2023). Pendapatan daerah merupakan penerimaan sah yang diterima pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, seperti pajak, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan ini penting untuk keberhasilan pembangunan daerah (Halim & Iqbal, 2019).

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Puspawardani, 2017). Belanja merupakan pengeluaran untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Pengelolaan belanja yang efisiensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Halim & Iqbal, 2019).

Pembiayaan daerah ialah transaksi yang melibatkan sumber daya finansial yang diperoleh dari luar anggaran, seperti pinjaman atau penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan anggaran daerah (Muliati et al., 2024). Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan, melalui pinjaman atau sisa anggaran tahun sebelumnya. Pembiayaan ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah (Halim & Iqbal, 2019).

Penelitian terkait pengelolaan APBD di berbagai daerah, seperti yang dilakukan oleh (Gunawan, 2018) di Pemerintah Kota Malang, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam periode 2007-2011 tergolong baik, dengan pertumbuhan PAD dan pajak daerah yang positif. Namun, penelitian tersebut juga mencatat adanya tantangan dalam efisiensi belanja, di mana belanja operasional mendominasi pengeluaran, dan efisiensi pelaksanaan APBD masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, penelitian oleh (Saputra et al.,

2024) mengungkapkan bahwa, meskipun ada pertumbuhan pendapatan yang positif, rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Tanah Datar oleh (Rufit & Desmiwerita, 2020) juga menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan dari segi pertumbuhan pendapatan dan belanja berada dalam kategori baik, derajat desentralisasi masih sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yang dapat berisiko terhadap kemandirian fiskal daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam pengelolaan APBD di tingkat daerah, tantangan dalam efisiensi belanja dan ketergantungan pada dana pusat masih menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori kontigensi. Teori agensi menjelaskan konflik kepetingan antara principal dan agen, Dimana setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (Jensen & Meckling, 2009). Teori ini menjadi dasar pelaporan keuangan pemerintah, menjelaskan bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan mempengaruhi penerimaan. Sementara itu, teori kontigensi, menurut Fiedler (1964), menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara pemimpin dan kondisi yang ada (Zulaihah, 2017). Teori ini digunakan untuk menjelaskan penyesuaian pengelolaan APBD dengan kondisi spesifik daerah yang mempengaruhi PAD.

Kabupaten Sinjai memiliki potensi ekonomi yang besar dari berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan industry pengelohan. Namun, meskipun memiliki potensi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, sementara ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tetap sangat tinggi. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia di daerah. Sebagai Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai Langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah penerapan digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan, meminimalkan kebocoran, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai (Ramling, 2024).

Penelitian ini berfokus pada tinjauan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sinjai, dengan menyoroti Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan strategis, seperti digitalisasi pajak dan retribusi daerah, mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah daerah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan APBD, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa APBD dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dari laporan resmi serta studi pustaka yang relevan. Analisis data mencakup beberapa

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

aspek, yaitu kinerja keuangan pendapatan daerah, yang melibatkan analisis pertumbuhan pendapatn dan rasio keuangan, seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan kontribusi BUMD. Selain itu, analisis kinerja keuangan belanja daerah dilakukan dengan mengukur pertumbuhan belanja, keserasian belanja (belanja operasi dan belanja modal), serta efisiensi belanja. Terakhir, kinerja pembiayaan daerah dianalisis dengan meninjai realisasi SiLPA dari tahun ke tahun. Pendekatan ini didasarkan pada teori (Mahmudi, 2010); (Gunawan, 2018) dan regulasi pemerintah yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Sinjai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Sinjai. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus di catat dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Tabel 1. merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021- 2023. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023, APBD Kabupaten Sinjai lebih memperbanyak anggaran pendapatan daripada anggaran belanja.

Tabel 1. APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023 (Dalam Rupiah)

Tahun	APBD		
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Surplus/ Defisit
2021	Rp. 1,119,776,613,827.00	Rp. 150,988,724,430.00	Rp. 968,787,889,397.00
2022	Rp. 1,028,641,394,184.00	Rp. 130,449,642,209.00	Rp. 898,191,751,975.00
2023	Rp. 1,064,387,746,002.00	Rp. 132,647,214,852.00	Rp. 931,740,531,150.00

Tabel 2. Realisasi APBD Kabupaten Sinjai 2021-2023 (Dalam Rupiah)

Tahun	REALISASI APBD		
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus/ Defisit
2021	Rp. 1,111,667,111,792.60	Rp. 146,717,346,866.00	Rp. 964,949,764,926.60
2022	Rp. 1,018,249,478,810.66	Rp. 128,651,170,807.00	Rp. 889,598,308,003.66
2023	Rp. 1,023,960,389,540.70	Rp. 124,650,714,422.00	Rp. 899,309,675,118.70

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023 pemerintah daerah mengalami surplus.

Pendapatan Daerah

Menurut (Halim & Iqbal, 2019) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Pos-Pos Pembentuk Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Tranfer		Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	
2021	Rp.	9,687,184,827.00	Rp.	1,051,915,799,000.00	Rp.	58,173,630,000.00
2022	Rp.	13,403,553,041.00	Rp.	1,012,237,841,143.00	Rp.	3,000,000,000.00
2023	Rp.	13,478,885,041.00	Rp.	1,048,208,860,961.00	Rp.	2,700,000,000.00
Total	Rp.	**36,569,622,909.00**	Rp.	**3,112,362,501,104.00**	Rp.	**63,873,630,000.00**

Sumber: BKAD Kabupaten Sinjai

Pendapatan Bagian Laba BUMD

Pendapatan bagian laba BUMD adalah pos penyusuna hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD memiliki konstribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. Berikut ini merupakan tabel pendapatan bagian laba BUMD Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023.

Tabel 4. Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD Kabupaten Sinjai (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD		Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD	
2021	Rp	4,773,194,827.00	Rp	4,226,678,359.00
2022	Rp	5,245,374,631.00	Rp	5,245,374,631.00
2023	Rp	5,190,435,808.00	Rp	5,190,435,808.00
Total	Rp	**15,209,005,266.00**	Rp	**14,662,488,798.00**

Sumber: BKAD Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan total anggaran pemerintah daerah untuk laba BUMD sebesar Rp. 15,209,005,266.00, sedang untuk realisasi yang dapat di peroleh dari BUMD sebesar Rp. 14,662,488,798.00.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi dan terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta dalam pemungutan pajak daerah belum efisien

1. Analisis Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah Tabel Perhitungan Pendapatan Daerah:

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

Tabel 5. Analisis Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran		Realisasi		Persentasi Realisasi APBD
2021	Rp.	1,119,776,613,827.00	Rp.	1,111,667,111,792.00	99.28%
2022	Rp.	1,028,641,394,184.00	Rp.	1,018,249,478,810.66	98.99%
2023	Rp.	1,064,387,746,002.00	Rp.	1,023,960,389,540.70	96.20%
Total	**Rp.**	**3,212,805,754,013.00**	**Rp.**	**3,153,876,980,143.36**	**294.47%**

Sumber: BKAD Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Tabel 5. Di atas secara umum dilihat dari analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dapat dikatakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan rata- rata persentase Realisasi dan Anggaran sebesar 294.47% persentase tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 99.28%, sedang persentase terendah yaitu tahun 2023 96.20%.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD tahun t =

$$\frac{PAD\ Tahun - PAD\ TAHUN\ T-1}{PAD\ Tahun\ t-1} \text{ x } 100\ \%$$

Pertumbuhan pendapatan Daerah pada tahun 2021-2023 di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	PAD Tahun t-1		PAD Tahun t		Persentase Pertumbuhan
2021-2022	Rp.	9,687,184,827.00	Rp.	13,403,553,041.00	38.36%
2022-2023	Rp.	13,403,553,041.00	Rp.	13,478,885,041.00	0.56%
Total	**Rp.**	**23,090,737,868.00**	**Rp.**	**26,882,438,082.00**	**38.93%**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6 di atas, kinerja Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023 dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini di tunjukkan dengan rata rata pertumbuhan yang positif yaitu 38.93%. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 yaitu 38.36% sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022-2023 yaitu 0.56%.

3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi di hitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jika derajat desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi di hitung dengan rumus sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi =

$$\frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \text{x } 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Derajat Desentralisasi (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Total Pendapatan Asli Daerah		Derajat Desentralisasi (%)
2021	Rp.	9,687,184,827.00	Rp.	1,111,667,111,792.00	0.87%
2022	Rp.	13,403,553,041.00	Rp.	1,018,249,478,810.66	1.32%
2023	Rp.	13,478,885,041.00	Rp.	1,023,960,389,540.70	1.32%
Total	**Rp.**	**36,569,622,909.00**	**Rp.**	**3,153,876,980,143.36**	**3.50%**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Sinjai tahun 2021- 2023 rendah dengan rata rata derajat desentralisasi sebesar 3.50%. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 1.32%, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 0.87%, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan desentralisasi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011), jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini merupakan rumus perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{Pendapatan\ Tranfer}{Total\ Pendapatan\ Tranfer} \text{x} 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer		Total Pendapatan Asli Daerah		Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2021	Rp.	1,051,915,799,000.00	Rp.	1,111,667,111,792.00	94.63%
2022	Rp.	1,012,237,841,143.00	Rp.	1,018,249,478,810.66	99.41%
2023	Rp.	1,048,208,860,961.00	Rp.	1,023,960,389,540.70	102.37%
Total	**Rp.**	**3,112,362,501,104.00**	**Rp.**	**3,153,876,980,143.36**	**296.40%**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 di atas perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat di katakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023 tinggi yang di tunjukkan dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 296.40%. tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 102.37%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 94.63% . hasil menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

c. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui konstribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka di katakan perusahaan daerah telah memiliki konstribusi terhadap pendapatan daerah. Berikut rumus perhitungan Derajat Konstribusi BUMD yaitu:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{Penerimaan\ Bagian\ Laba\ BUMD}{Penerimaan\ PAD} \text{X}100\%$$

Rasio Derajat Konstribusi BUMD di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Derajat Kontribusi BUMD (Dalam Rupiah)

Tahun	Penerimaan Bagian Laba BUMD		Penerimaan Pendapatan Daerah		Derajat Kontribusi BUMD
2021	Rp.	4,226,678,359.00	Rp.	1,111,667,111,792.00	0.38%
2022	Rp.	5,245,374,631.00	Rp.	1,018,249,478,810.66	0.52%
2023	Rp.	5,190,435,808.00	Rp.	1,023,960,389,540.70	0.51%
Total	**Rp.**	**14,662,488,798.00**	**Rp.**	**3,153,876,980,143.36**	**0.46%**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 9 perhitungan derajat konstribusi BUMD di atas menunjukkan bahwa konstribusi BUMD untuk pendapatan daerah secara umum mencapai angka 0.46%. konstribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 0.52%, sedang konstribusi BUMD terendah Terjadi pada tahun 2021 yaitu 0.38%. dari hasil ini memperlihatkan bahwa derajat konstribusi BUMD setiap tahunnya lebih dari 0% sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki konstribusi terhadap pendapatan daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

1. Analisis Belanja Daerah

Berikut ini tabel perhitungan analisis belanja daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023:

Tabel 10. Analisis Belanja Daerah (Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja				Persentase Realisasi APBD
	Anggaran		Realisasi Belanja		
2021	Rp.	150,988,724,430.00	Rp.	146,717,346,866.00	97.17%
2022	Rp.	130,449,642,209.00	Rp.	128,651,170,807.00	98.62%
2023	Rp.	132,647,214,852.00	Rp.	124,650,714,422.00	93.97%
Total	**Rp.**	**414,085,581,491.00**	**Rp.**	**400,019,232,095.00**	**96.60%**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 10, Analisis Belanja Daerah pada tahun 2021-2023 terlihat realisasi tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja. Secara umum di lihat dari analisis belanja daerah, kinerja keuangan Kabupaten Sinjai dapat di katakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan angka rata- rata persentase realisasi anggaran dan belanja daerah mencapai 93.60%. realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 98.62% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 93.97%.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan

belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun t} = \frac{Belanja\ Tahun\ t - Belanja\ Tahun\ t-1}{Belanja\ Tahun\ t-1} \text{x}100\%$$

Pertumbuhan pendapatan Daerah pada tahun 2021-2023 di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	Belanja Tahun t-1		Belanja Tahun t		Persentase Pertumbuhan
2021-2022	Rp.	146,717,346,866.00	Rp.	128,651,170,807.00	-12.31
2022-2023	Rp.	128,651,170,807.00	Rp.	124,650,714,422.00	-3.11
Total	**Rp.**	**275,368,517,673.00**	**Rp.**	**253,301,885,229.00**	**-15.42**

Sumber: Data diolah, 2024

Dari Tabel 11 perhitungan di atas Kinerja Keuangan Belanja Daerah di lihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini di tunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -15.42%. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2023 yaitu -12.31%, sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2022-2023 yaitu -3.11%.

3. Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja. Rumus untuk menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \text{x}100\%$$

Sedangkan:

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \text{x}100\%$$

Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja. Rumus untuk menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Rasio Belanja Operasi Dan Belanja Modal Tahun 2021-2023

Tahun	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja		Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja		Rasio Keserasian %	
					Belanja Operasi	Belanja Modal
2021	Rp.	9,162,134,918.00	Rp.	60,674,000.00	6.24%	0.04%
	Rp.	146,717,346,866.00	Rp.	146,717,346,866.00		
2022	Rp.	5,852,843,893.00	Rp.	47,779,000.00	4.55%	0.04%
	Rp.	128,651,170,807.00	Rp.	128,651,170,807.00		
2023	Rp.	4,796,623,484.00	Rp.	5,000,000.00	3.85%	0.00%
	Rp.	124,650,714,422.00	Rp.	124,650,714,422.00		
				Rata-Rata	**14.64%**	**0.08%**

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

Berdasarkan Tabel 12 perhitungan di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2021-2023 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi di bandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Selama tahun 2021-2023 rata-rata belanja operasi sebesar 14.64% sedangkan untuk belanja modal sebesar 0.08%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar di alokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis di konsumsi dalam satu tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2010:164) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi di bandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang di lakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya urang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut ini tabel perhitungan analisis efisiensi belanja daerah tahun 2011-2015.

Tabel 13. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2021-2023 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2021	Rp. 146,717,346,866.00	Rp. 150,988,724,430.00	97.17%
2022	Rp. 128,651,170,807.00	Rp. 130,449,642,209.00	98.62%
2023	Rp. 124,650,714,422.00	Rp. 132,647,214,852.00	93.97%

Sumber: Data diolah, 2024

Dari Tabel 13 diatas terlihat bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah daerah selama tahun 2021-2023 tidak melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pada setiap tahun, rasio efisiensi belanja menunjukkan angka dibawah 100% dengan rincian 97.17% pada tahun 2021, 98.62% pada tahun 2022, dan 93.97% pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja selama periode tiga tahun tersebut, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Analisis Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021-2023 untuk pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 14. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penggunaan SiLPA	Rp. 87,878,065,810.00	Rp. 87,878,065,810.93	100
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. -	Rp. -	0
Jumlah	**Rp. 87,878,065,810.00**	**Rp. 87,878,065,810.93**	**100**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 15. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022

Uraian		Anggaran		Realisasi	%
Penggunaan SiLPA	Rp.	75,258,552,030.00	Rp.	75,258,552,030.00	100
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	-	Rp.	-	0
Jumlah	**Rp.**	**75,258,552,030.00**	**Rp.**	**75,258,552,030.00**	**100**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 16. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023

Uraian		Anggaran		Realisasi	%
Penggunaan SiLPA	Rp.	85,457,387,433.00	Rp.	85,466,086,664.26	100.01
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	-	Rp.	-	0
Jumlah	**Rp.**	**85,457,387,433.00**	**Rp.**	**85,466,086,664.26**	**100.01**

Sumber: Data diolah, 2024

2. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 17. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021

Uraian		Anggaran		Realisasi	%
Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-	Rp.	-	0
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp.	3,000,000,000.00	Rp.	3,000,000,000.00	100
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	Rp.	-	Rp.	-	0
Jumlah	**Rp.**	**3,000,000,000.00**	**Rp.**	**3,000,000,000.00**	**100**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 18. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022

Uraian		Anggaran		Realisasi	%
Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-	Rp.	-	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp.	3,000,000,000.00	Rp.	3,000,000,000.00	100
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	Rp.	11,070,712,034.00	Rp.	-	0.00
Jumlah	**Rp.**	**14,070,712,034.00**	**Rp.**	**3,000,000,000.00**	**21.32**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 19. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023

Uraian		Anggaran		Realisasi	%
Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-	Rp.	-	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp.	2,700,000,000.00	Rp.	-	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	Rp.	-	Rp.	-	0.00
Jumlah	**Rp.**	**2,700,000,000.00**	**Rp.**	**-**	**0.00**

Sumber: Data diolah, 2024

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

3. Pembiayaan Netto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan Neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada tahun anggaran 2021-2023 pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan Neto, dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 20. Pembiayaan Neto Tahun 2021

Uraian		Anggaran		Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87,878,065,810.00	Rp.	87,878,065,810.93
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3,000,000,000.00	Rp.	3,000,000,000.00
Pembiayaan Neto	**Rp.**	**84,878,065,810.00**	**Rp.**	**84,878,065,810.93**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 21. Pembiayaan Neto Tahun 2022

Uraian		Anggaran		Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	75,258,552,030.00	Rp.	75,258,552,030.16
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	14,070,712,034.00	Rp.	3,000,000,000.00
Pembiayaan Neto	**Rp.**	**61,187,839,996.00**	**Rp.**	**72,258,552,030.16**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 22. Pembiayaan Neto Tahun 2023

Uraian		Anggaran		Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	85,457,387,433.00	Rp.	85,466,086,664.26
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2,700,000,000.00	Rp.	-
Pembiayaan Neto	**Rp.**	**82,757,387,433.00**	**Rp.**	**85,466,086,664.26**

Sumber: Data diolah, 2024

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah Selisih Lebih/Kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Adapun Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2021-2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 23. Sisa Lebih Pembiayaan Neto Tahun 2021

Uraian		Realisasi
Surplus	Rp.	964,949,764,926.60
Pembiayaan Neto	Rp.	84,878,065,810.93
SiLPA	**Rp.**	**1,049,827,830,737.53**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 24. Sisa Lebih Pembiayaan Neto Tahun 2022

Uraian		Realisasi
Surplus	Rp.	889,598,308,003.66
Pembiayaan Neto	Rp.	72,258,552,030.16
SiLPA	**Rp.**	**961,856,860,033.82**

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 25. Sisa Lebih Pembiayaan Neto Tahun 2023

Uraian		Realisasi
Surplus	Rp.	899,309,675,118.70
Pembiayaan Neto	Rp.	85,466,086,664.26
SiLPA	**Rp.**	**984,775,761,782.96**

Sumber: Data diolah, 2024

Pembahasan

Pendapatan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pendapatan kabupaten sinjai selama periode tahun 2021-2023 yang meliputi:

1. Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah kabupaten sinjai dapat di katakan baik. Ditunjukkan dengan target realisasi anggran pendapatan dari tahun 2021-2023 memiliki angka rata-rata sebesar 294.47%. jika di lihat dari tiga periode yang di teliti, maka persentase paling tinggi pada tahun 2021 yaitu mencapai angka 99.28% sedangkan persentase yang terendah pada tahun 2023 yaitu mencapai angka 96.20%. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh (Gunawan, 2018) yaitu bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah tergolong baik.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan positif, sedang dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi, 2010). Analisis pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten sinjai mengalami peningkatan kinerja keuangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif 38.93%. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 yaitu 38.36% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022-2023 yaitu 0.56%. Hasil ini mendukung pendapat dari (Rufit & Desmiwerita, 2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari segi pertumbuhan pendapatan dan belanja berada dalam kategori baik,

3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan pendapatan daerah menunjukkan secara umum kinerja keuangan pendapatan kabupaten Sinjai berdasarkan:

a. Derajat Desentralisasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011), menyebutkan jika derajat desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi kabupaten sinjai menunjukkan rata-rata 3.50%. sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 1.32%, sedangkan derajat desentralisasi terendah pada tahun 2021 yaitu 0.87%. Hasil ini mendukung pendapat dari (S. C. Saputra et al., 2018) mengungkapkan bahwa, meskipun ada pertumbuhan pendapatan yang positif, rasio derajat desentralisasi dan kemandirian

REMITTANCE
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VOLUME 06 NOMOR 01 JUNI 2025
ISSN 2774-2407 (p-issn) | 2774-2288 (e-issn)

keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011) menjelaskan jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 505 berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten sinjai menunjukkan angka rata-rata sebesar 296.40%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 102.37%. sedangkan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 94.63%. angka di atas masih diatas 50% memperlihatkan bahwa kabupaten sinjai masih sangat tergantung pada pemerintah daerah pusat. Hasil ini mendukung pendapat dari (S. C. Saputra et al., 2018) mengungkapkan bahwa, meskipun ada pertumbuhan pendapatan yang positif, rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

c. Derajat Kontribusi BUMD

Jika dilihat dari derajat kontribusi BUMD, perusahaan daerah dikatakan memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka diatas 0%. Derajat kontribusi BUMD kabupaten sinjai menunjukkan angka rata-rata lebih dari 0% yaitu 0.46%. kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 0.52% sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 0.38%. hal ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di pemerintah kabupaten sinjai telah memiliki kontribusi terhadap besarnya pendapatan daerah kabupaten sinjai.

Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan belanja daerah kabupaten sinjai selama periode tahun 2021-2023 yang meliputi:

1. Analisis Belanja Daerah

Berdasarkan analisis belanja daerah, secara umum kinerja keuangan belanja daerah Kabupaten Sinjai dapat di kategorikan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, serta rata-rata realisasi anggaran belanja selama periode 2021-2023 mencapai 96.60%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 98.62%, sedangkan realisasi terendah tercatat pada tahun 2023 sebesar 93.97%. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Rufit & Desmiwerita, 2020) & (S. C. Saputra et al., 2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan dan belanja berada dalam kategori baik,

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Belanja daerah Kabupaten Sinjai mengalami penurunan total sebesar -15,42% pada periode 2021-2023. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar -12,31%, pada tahun 2022-2023, penurunan lebih kecil, yaitu -3,11%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, perubahan kondisi ekonomi daerah, atau penyesuaian terhadap pendapatan daerah. Menurut (Mahmudi, 2010), penurunan belanja daerah sering kali dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi yang ada.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja daerah Kabupaten Sinjai pada 2021-2023 menunjukkan dominasi belanja operasi dengan rata-rata rasio 14,64%, sementara belanja modal sangat rendah, hanya 0,08%. Pada 2021, rasio belanja operasi 6,24% dan belanja modal 0,04%. Tren ini berlanjut pada 2022 dan 2023, dengan belanja modal bahkan kurang dari 0,01%. Proporsi ini jauh dari standar ideal belanja modal sebesar 5-20% menurut (Mahmudi, 2010), alokasi belanja modal yang sangat kecil ini mengindisikan perlunya peningkatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Analisis efisiensi belanja daerah kabupaten sinjai selama periode 2021-2023 menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Berdasarkan rasio efisiensi belanja, pada tahun 2021 tercatat sebesar 97,17%, tahun 2022 sebesar 98,62% dan tahun 2023 sebesar 93,97%. Rasio yang berada dibawah 100% ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengelola anggaran secara efisien, sesuai dengan pendapat (Mahmudi, 2010), yang menyatakan bahwa rasio dibawah 100% mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah bertujuan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Hasil penelitian menunjukkan stabilitas penerimaan pembiayaan sebesar 100% pada tahun 2021-2022 dan sedikit meningkat menjadi 100,01% pada tahun 2023. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan signifikan, dari 100% pada tahun 2021 menjadi 21,32% pada tahun 2022, lalu turun ke 103,27% pada tahun 2023. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tetap stabil dengan variasi kecil, menunjukkan surplus yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Artanti, 2018), yang menyakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai oleh stabilitas penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan kemampuan menghasilkan SiLPA positif. Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif sesuai prinsip tersebut.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di laksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sinjai selama 2021-2023 menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 294,47% dan Pertumbuhan Positif 38,93%. Namun, rasio derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah masih rendah, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana tranfer pusat. Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah juga positif, tergolong kecil. Dapat disimpulkan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang baik, ketergantungan pada pusat masih menjadi tantangan.

Kinerja belanja daerah Kabupaten Sinjai selama 2021-2023 dapat dikategorikan baik. Realisasi anggaran belanja mencapai rata-rata 96,60%, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 98,62%. Penurunan belanja sebesar -15,42%, penurunan ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi. Namun, alokasi belanja modal yang sangat rendah, hanya 0,08%, menunjukkan perlunya peningkatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dapat di simpulkan efisiensi belanja daerah menunjukkan hasil yang baik, dengan rasio efisiensi anggaran berada di bawah 100%, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan stabilitas yang baik selama periode 2021-2023. Penerimaan pembiayaan mencapai 100% pada tahun 2021-2022 dan sedikit meningkat menjadi 100,01% pada tahun 2023. Namun, pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan signifikan, dari 100% pada tahun 2021 menjadi 21,32% pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 103,27% pada tahun 2023. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tetap stabil dengan variasi kecil, mencerminkan surplus yang konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien dan stabil, sesuai dengan prinsip pengeloaan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arman, Abdullah, & Saripuddin D. (2023).

Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal*, *1*(5), 605–617. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/4495

Gunawan, S. E. (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. *Parsimonia : Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, *4*(3), 329–345. https://doi.org/10.33479/parsimonia.v4i3.77

Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hanifa, R., & Amalia, V. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, *6*(1), 34–48. https://doi.org/10.51877/jiar.v6i1.258

Jensen, M., & Meckling, W. (2009). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The Economic Nature of the Firm A Reader* (pp. 283–303). Cambridge : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Marwati, S., & Pratiwi, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah ALIANSI*, *6*(2), 58–66. https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i2.275

Muliati, Ruma, Z., Anwar, Budiyanti, H., & Aslam, A. P. (2024). Perencanaan dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa. *Journal of Management and Social Sciences*, *3*(3), 227–254. https://doi.org/10.55606/jimas.v3i3.1468

Puspawardani, W. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i1.379

Ramling, J. (2024, January 6). Penerimaan Pajak dan Retribusi Non Tunai Kabupaten Sinjai Melesat Tinggi! *Saudagar News*. https://www.saudagar.news/Penerimaan-Pajak-Dan-Retribusi-Non-Tunai-Kabupaten-Sinjai-Melesat-Tinggi/

Rufit, S. D., & Desmiwerita. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Pareso : Jurnal Pengembangan Ilmu Akuntansi & Keuangan*, *2*(2), 275–284. https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/120

Saputra, I., Sandung, C. L., B, I. A., Amelia, V., & Sadriani, A. (2024). The Influence of the APBDes on Road Construction in Gantarang Village, Sinjai District. *FJAS : Formosa Journal Of Applied Sciences*, *3*(3), 959–966. https://doi.org/10.55927/fjas.v3i3.8554

Zulaihah, I. (2017). Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 76–87. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.29